



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 6 (enam)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI
2. Penjelasan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Terhadap
Program Kerja Tahun 2025.
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI
39 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;
Muhammad Zuhri, beserta jajaran
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan; Anggoro
Eko Cahyo, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 15.18 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, pengembangan dana Jaminan Sosial dan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan terobosan Program Perlindungan Paripurna Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja dalam hal:
 - a. menyederhanakan prosedur klaim agar lebih efisien tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi yang ada;
 - b. program edukasi bagi pekerja mengenai hak dan akses layanan jaminan sosial yang tersedia sehingga membantu pekerja memahami dan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki setelah kehilangan pekerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas potensi kepesertaan baik Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam RDP hari ini paling lambat Senin, 4 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.36 WIB.

Jakarta, 28 Oktober 2024

DEWAS BPJS KETENAGAKERJAAN



MUHAMMAD ZUHRI

KETUA RAPAT,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416

DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN



ANGGORO EKO CAHYO